

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL**

**Jl. Tentara Pelajar No.03 Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495031 Fax (0271) 494043 Kode Pos 57716**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga merupakan implementasi pertanggungjawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Karanganyar, Desember 2017

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610419 198503 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS
SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA
DATANG

LAMPIRAN

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU);*
- 2) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);*
- 3) Perjanjian Kinerja (PK).*

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

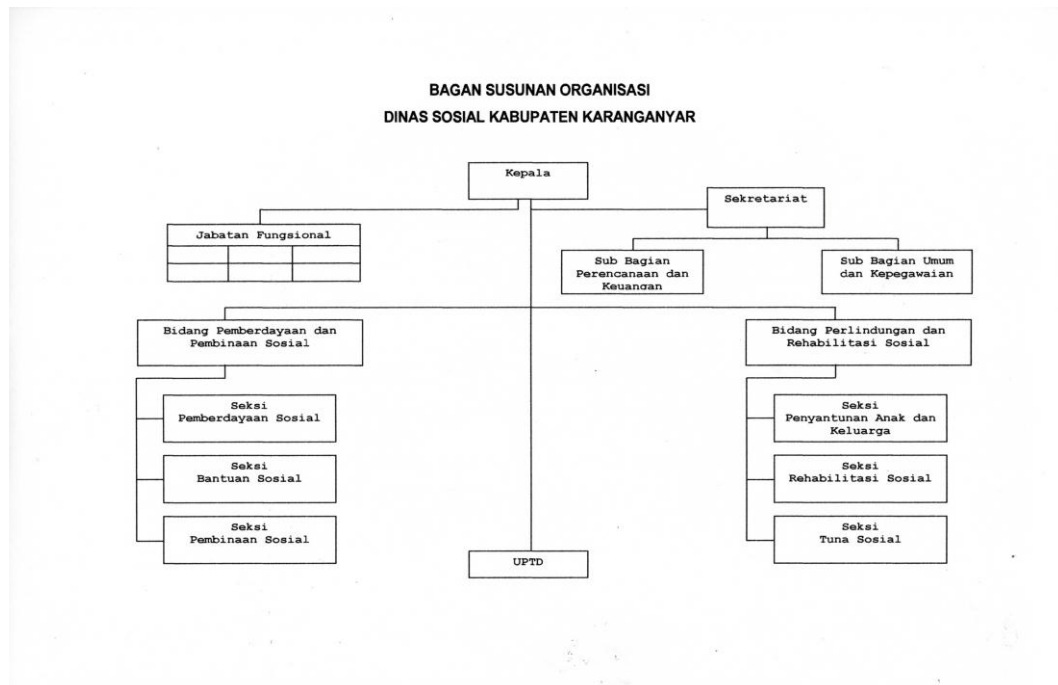
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar. Adapun Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : Melaksanakan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial serta Bantuan dan Jaminan Sosial melalui misi yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan sosial, Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.

4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Rawan Sosial.
8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Karanganyar yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
2. Tingginya mobilitas PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta

Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.

4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	5,63 %

1	2	3
	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	41%
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS yang terampil dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	79,4%
	Prosentase Taruna Siaga Bencana yang aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat	50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi 2 sasaran strategis, yaitu : (1) Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS dan (2) Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir Renstra Th 2018	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	5,52	5,63	102	5,4	104,2
2.	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	37,8	41	108,5	38,3	107
Persentase Capaian Sasaran Strategis					105,25		105,6

Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2017 diatas sebesar 105,25 % atau kategori **Sangat Baik**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 sebanyak 58.452 orang, yang mendapat penanganan pada Tahun 2017 sebanyak 3.291 orang atau 5,63% dari target yang ditetapkan sebesar 5,52%, kemudian untuk jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial Kabupaten Karanganyar sebanyak 7.946 orang, yang menerima jaminan sosial sebanyak 3.263 atau 41% dari target yang ditetapkan sebesar 37,8%.

Capaian kinerja sasaran 1 Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah tercapai 105,6%. Untuk indikator Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 104,2%. Sementara itu untuk capaian indikator Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tercapai 107%.

Program pendukung sasaran 1 antara lain :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Pembinaan Anak Terlantar

Tabel 3.3
Sasaran 2. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir Renstra Th 2018	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Prosentase PSKS yang terampil dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	79,4	79,4	100	83,10	95,55
2.	Prosentase Taruna Siaga Bencana yang aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat	%	50	50	100	71,40	70
Persentase Capaian Sasaran Strategis					100		82,78

Capaian kinerja sasaran 2 diatas sebesar 100 % atau kategori **Baik**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Karanganyar sebanyak 2.246 orang, yang terampil dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 1.782 orang atau 79,4% dari target yang ditetapkan sebesar 79,4%, sedangkan jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 70 orang, yang aktif dalam penanggulangan

bencana sebanyak 35 orang atau 50% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.

Capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah tercapai 82,78%. Untuk indikator Prosentase PSKS yang terampil dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tercapai 95,55%. Sementara itu untuk capaian indikator Prosentase Taruna Siaga Bencana yang aktif dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat tercapai 70%.

Program pendukung sasaran 2 yaitu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator tercapai melebihi target dan 2 (dua) indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Anggaran pendukung pencapain sasaran strategis pada tahun 2017 telah dialokasikan sebesar Rp.1.875.865.000,- terealisasi sebesar Rp.1.860.291.282,- (99,17%) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,83% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, antara lain :

1. Data kemiskinan yang nantinya dijadikan acuan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih belum akurat.
2. Masih tingginya PMKS yang membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penanganannya.
3. Peran PSKS dalam penanganan PMKS masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten Karanganyar.
4. Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.

Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala, antara lain :

1. Perlu adanya verifikasi dan validasi data di lapangan terkait dengan data kemiskinan.

2. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga alokasi anggaran harus berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.
3. Optimalisasi peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan kerjasama yang efektif melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam penanganan PMKS.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Lintas Wilayah, Lintas Instansi dan Lintas Sektoral.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 10 program dan 34 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.3.234.565.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.177.913.585,- (98,25%), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	569.300.000	534.824.395	93,94
▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000	3.750.000	100
▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	83.433.286	75,85
▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	100
▪ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	210.200.000	206.000.000	98
▪ Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.350.000	30.350.000	100
▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	16.375.000	81,88

1	2	3	4
▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100
▪ Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	30.000.000	100
▪ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	120.000.000	119.916.109	99,93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	674.000.000	641.247.908	99,11
▪ Pengadaan kendaraan dinas/operasional	340.000.000	335.400.000	98,65
▪ Pengadaan Komputer	35.000.000	34.900.000	99,71
▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	135.000.000	135.000.000	100
▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.000.000	79.939.158	99,92
▪ Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Jaringan	15.000.000	15.000.000	100
▪ Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor	42.000.000	41.008.750	97,64
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	92.400.000	91.800.000	99,35
▪ Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	92.400.000	91.800.000	99,35
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	432.000.000	430.145.025	99,57
▪ Pendampingan KUBE Kemensos RI	210.000.000	209.999.500	99,99
▪ Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH)	212.000.000	210.145.525	99,13
▪ Pembinaan Lanjut Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	10.000.000	10.000.000	100
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	382.000.000	379.562.757	99,36
▪ Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	25.000.000	25.000.000	100
▪ Biaya Operasional Bantuan Sosial	7.500.000	7.484.733	99,36
▪ Paket Sembako kepada Fakir Miskin	289.500.000	287.990.000	99,48
▪ Perlindungan dan Jaminan Sosial	50.000.000	50.000.000	100
▪ Fasilitasi Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	10.000.000	9.088.024	90,88

1	2	3	4
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	136.600.000	132.368.500	96,90
▪ Fasilitasi UPSK, Difabel, TAD, dan Hipenca	136.600.000	132.368.500	96,90
Program Pembinaan Pantu Asuhan/Pantu Jompo	10.000.000	10.000.000	100
▪ Pembinaan dan pemberian bantuan kepada pantu asuhan.	10.000.000	10.000.000	100
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	161.500.000	160.500.000	99,38
▪ Tindak lanjut Razia PGOT	61.500.000	61.500.000	100
▪ Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	100.000.000	99.000.000	99
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	753.765.000	747.715.000	99,20
▪ Pemberdayaan satgas penanggulangan kemiskinan dan aksi sosial	197.000.000	193.460.000	98,20
▪ Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	274.265.000	274.265.000	100
▪ Pembinaan dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	10.000.000	10.000.000	100
▪ Bantuan Operasional TAGANA	22.500.000	20.700.000	92
▪ Pelatihan dan bantuan peralatan bagi masyarakat rawan sosial dan masyarakat difabel	250.000.000	249.290.000	99,72
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	50.000.000	49.750.000	99,50
▪ Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000	49.750.000	99,50
JUMLAH	3.234.565.000	3.177.913.585	98,25

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Karangayar sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan *on the track*, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (102,6%), dengan rincian per sasaran (1) Meningkatnya kualitas pelayanan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS 105,25% (2) Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 100%

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG


Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak yatim, piatu, yatim piatu serta anak korban tindak kekerasan.
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga

- mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
 6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
 7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
 8. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial.
 9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610419 198503 1 011